



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 89 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CISURUPAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CISURUPAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 89**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
CISURUPAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada Rencana Kerja Tahun 2022 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Cisurupan sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Cisarupan telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis perubahan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 11 Tahun 2020 Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota

untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Reviu Tahunan Kecamatan Cisarupan tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014

- tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
 31. Keputusan Bupati Garut Nomor: 050/Kep.676-Kec/2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan
 32. Keputusan Camat Cisurupan Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Reviu Kecamatan Cisurupantahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cisurupan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Reviu Kecamatan Cisurupan tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Tarogong Kidul;

3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Ciburupan Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah

1.3.2 Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ciburupan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Ciburupan sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ciburupan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Ciburupan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciburupan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Ciburupan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Cisurupan, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perubahan Kecamatan Tarogong Kidul.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta sub kegiatan , antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan serta sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CISURUPAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Ciburupan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran

tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cisarupan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisarupan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cisarupan selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cisarupan Tahun 2020 antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional.
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor.

- 2) Pengadaan Meubeulair.
 - 3) Pengadaan Peralatan Kantor.
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 5) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 6) Rehabilitasi sedang /Berat Gedung Kantor.
 - 7) Penataan halaman Gedung Kantor.
 - 8) Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor untuk Persiapan PATEN.
 - 9) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua).
 - 10) Pembangunan Gedung Pos Jaga SatpolPP.
 - 11) Pengadaan Mobil Operasional.
 - 12) Pengadaan Sistem Keamanan/CCTV Infinity.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu :
 - 1) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur.
 - Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu :
 - 1) Pelaporan Keuangan.
 - 2) Penyusunan dokumen Perencanaan.
 - Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :
 - 1) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.
 - 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan.
 - 3) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan.
 - 4) Penyusunan RPTK Kecamatan.
 - 5) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.
 - 6) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

- 7) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya.
 - 8) Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan.
 - 9) Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan.
 - 10) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya.
 - 11) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan.
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - 2) LAPHALI (Layanan pada Hari Libur).
 - 3) SILEK (Sistem Layanan Elektronik Kecamatan).

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 3 (Tiga) Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 94,04 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 8.160.000,- terealisasi Rp. 7.674.260,-. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 74,87 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.964.720,- terealisasi Rp. 1.471.100,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Meubeulair prosentase realisasi

keuangan 99,87 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 28.000.000,- terealisasi Rp. 27.964.000,-. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor prosentase realisasi keuangan 99,23 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 88.640.000,- terealisasi Rp. 87.961.000,-. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 99,95 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 66.786.000,- terealisasi Rp. 66.759.000,-. Kegiatan Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor untuk Persiapan PATEN prosentase realisasi keuangan 98,98 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 19.050.000,- terealisasi Rp. 18.856.818,-. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) prosentase realisasi keuangan 96,69 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,- terealisasi Rp. 69.621.700,-. Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional prosentase realisasi keuangan 94,18 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp. 282.550.000,-.

- c. Program Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya prosentase realisasi keuangan 93,11 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 17.423.900,- terealisasi Rp 16.223.900,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

| No | Kegiatan | Tahun 2020 | | |
|----|---|---------------|----------------|-------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 8.160.000 | 7.674.260 | 94,04 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------|
| | Daya Air dan Listrik | | | |
| 2 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.964.720,- | 1.471.100,- | 74,87 |
| 3 | Kegiatan Pengadaan Meubeulair | 28.000.000,- | 27.964.000,- | 99,87 |
| 4 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor | 88.640.000,- | 87.961.000,- | 99,23 |
| 5 | Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor | 66.786.000,- | 66.759.000,- | 99,95 |
| 6 | Kegiatan Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor untuk Persiapan PATEN | 19.050.000,- | 18.856.818,- | 98,98 |
| 7 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) | 72.000.000 | 69.621.700,- | 96,69 |
| 8 | Kegiatan Pengadaan Mobil Operasional | 300.000.000,- | 282.550.000,- | 94,18 |
| 9 | Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya | 17.423.900,- | 16.223.900,- | 93,11 |

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.459.390,- terealisasi Rp. 16.459.390,-.
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.197.500,- terealisasi Rp. 5.197.500,-.
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 55.773.480,- terealisasi Rp. 55.773.480,-.
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase

- realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 11.184.000,- terealisasi Rp. 11.184.000,-.
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.687.400,- terealisasi Rp. 5.687.400,-.
 - f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.442.000,- terealisasi Rp. 2.442.000,-.
 - g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.080.000,- terealisasi Rp. 4.080.000,-.
 - h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dalam Daerah realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.500.000,- terealisasi Rp. 4.500.000,-.
 - i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.812.000,- terealisasi Rp. 15.812.000,-.
 - j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 13.845.000,- terealisasi Rp. 13.845.000,-.
 - k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 97.713.000,- terealisasi Rp. 97.713.000,-.
 - l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Pos Jaga SatpolPP prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 99.693.000,- terealisasi Rp. 99.693.000,-.

- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sistem Keamanan/CCTV Infinity prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.000.000,- terealisasi Rp. 6.000.000,-.
- n. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Kegiatan Pelaporan Keuangan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.276.000,- terealisasi Rp. 4.276.000,-.
- o. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/kelurahan Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 8.405.000,- terealisasi Rp. 8.405.000,-.
- p. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.228.000,- terealisasi Rp. 2.228.000,-.
- q. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 11.664.500,- terealisasi Rp. 11.664.500,-.
- r. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.160.000,- terealisasi Rp. 5.160.000,-.
- s. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.710.000,- terealisasi Rp. 1.710.000,-.
- t. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kegiatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 340.000,- terealisasi Rp. 340.000,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

| No | Kegiatan | Tahun 2020 | | |
|----|---|---------------|----------------|-----|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 16.459.390,- | 16.459.390,- | 100 |
| 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 16.459.390,- | 16.459.390,- | 100 |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 55.773.480,- | 55.773.480,- | 100 |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.184.000,- | 11.184.000,- | 100 |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.687.400,- | 5.687.400,- | 100 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.442.000,- | 2.442.000,- | 100 |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 4.080.000,- | 4.080.000,- | 100 |
| 8 | Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dalam Daerah | 4.500.000,- | 4.500.000,- | 100 |
| 9 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 15.812.000,- | 15.812.000,- | 100 |
| 10 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 13.845.000,- | 13.845.000,- | 100 |
| 11 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 97.713.000,- | 97.713.000,- | 100 |
| 12 | Kegiatan Pembangunan Gedung Pos Jaga SatpolPP | 99.693.000,- | 99.693.000,- | 100 |
| 13 | Kegiatan Pengadaan Sistem Keamanan/CCTV Infinity | 6.000.000,- | 6.000.000,- | 100 |
| 14 | Kegiatan Pelaporan Keuangan | 4.276.000,- | 4.276.000,- | 100 |
| 15 | Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/kelurahan Tingkat Kecamatan | 8.405.000,- | 8.405.000,- | 100 |
| 16 | Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan | 2.228.000,- | 2.228.000,- | 100 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-----|
| 17 | Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan | 11.664.500,- | 11.664.500,- | 100 |
| 18 | Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan | 5.160.000,- | 5.160.000,- | 100 |
| 19 | Kegiatan Penyelenggaraa Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan | 1.710.000,- | 1.710.000,- | 100 |
| 20 | Kegiatan Penyelenggaraa Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) | 340.000,- | 340.000,- | 100 |

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisurupan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi

target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cisarupan pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cisarupan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cisarupan.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Renstra SKPD Kecamatan Cisarupan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cisarupan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cisarupan yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Tahun 2020

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian(%) | Ket. |
|----|---|-------------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 81 | Triwulan 1 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 2 | 81 | 80.58 | 99.48 | |
| | | | | | | Triwulan 3 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 4 | 81 | 82.75 | 102.16 | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | 82.75 | 102.16 | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan | 2.1 | Persentase Desa Yang Berkinerja Baik | % | 100 | Triwulan 1 | 25 | 25 | 100.00 | |
| | | | | | | Triwulan 2 | 25 | 25 | 100.00 | |
| | | | | | | Triwulan 3 | 25 | 25 | 100.00 | |
| | | | | | | Triwulan 4 | 25 | 25 | 100.00 | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | 100 | 100.00 | | |
| 3 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan | 3.1 | Nilai Sakip Kecamatan | Opini | BB | Triwulan 1 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 2 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 3 | | | | |
| | | | | | | Triwulan 4 | BB | BB | 100.00 | |
| | | | | | | Kondisi Akhir (F) | | BB | 100.00 | |

Keterangan

| Warna | Prosentase | Keterangan |
|---|------------|------------------|
|  | n/a | Tidak Ada Target |
|  | < 100% | Tidak Tercapai |
|  | = 100% | Tercapai |
|  | > 100% | Melebihi Target |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Cisurupan tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiq kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102,16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cisurupan. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Cisurupan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cisurupan

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | | |
|------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2020 | Realisasi Renja SKPD tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| 7 | Urusan Wajib | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | Bidang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 17 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 99,20 % | 100 % | 99,20 % | 99,20 % | 99,20 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 002 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100 % | 94,04 % | 100 % | 94,04 % | 94,04 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 006 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Terlaksananya penunjang kegiatan di lingkungan kantor | 100 % | 74,87 % | 100 % | 74,87 % | 74,87 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 008 | Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 009 | Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 010 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 011 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 014 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 013 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 015 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|--|---|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 7 | 01 | 17 | 01 | 017 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 01 | 021 | Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah | Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 97,42 % | 100 % | 97,42 % | 97,42 % | 100 % | 97,42 % | 97,42 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 010 | Pengadaan Meubelair | Jumlah Perlengkapan Meubelair Kantor yang memadai | 100% | 99,87 % | 100 % | 99,87 % | 99,87 % | 100 % | 99,87 % | 99,87 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 012 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang memadai | 100% | 99,23 % | 100 % | 99,23 % | 99,23 % | 100 % | 99,23 % | 99,23 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 022 | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor | Jumlah Gedung kantor yang memadai | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 041 | Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang Memadai | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 045 | Penataan Halaman Gedung Kantor | Jumlah Halaman Kantor yang Memadai | 100 % | 99,95 % | 100 % | 99,95 % | 99,95 % | 100 % | 99,95 % | 99,95 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 074 | Pengadaan sarana Perlengkapan Kantor untuk persiapan PATEN | Jumlah Perlengkapan Untuk Sarana PATEN yang Memadai | 100 % | 98,98 % | 100 % | 98,98 % | 98,98 % | 100 % | 98,98 % | 98,98 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 248 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (2) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Memadai | 100 % | 96,69 % | 100 % | 96,69 % | 96,69 % | 100 % | 96,69 % | 96,69 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 257 | Pembangunan Pos Jaga Satpol PP | Jumlah Gedung Posjaga Satpol PP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 316 | Pengadaan Mobil Operasional | Jumlah Mobil Operasional | 100 % | 94,18 % | 100 % | 94,18 % | 94,18 % | 100 % | 94,18 % | 94,18 % |
| 7 | 01 | 17 | 02 | 331 | Pengadaan Sistem Keamanan CCTV Infinity | Jumlah CCTP Infinity yang Memadai | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 06 | | Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan | Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 06 | 013 | Kegiatan Pelaporan Keuangan | Terpenuhinya kewajiban pelaporan yang tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|--|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 7 | 01 | 17 | 82 | Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat di wilayah Kecamatan | 100 % | 97,42 % | 100 % | 97,42 % | 97,42 % | 100 % | 97,42 % | 97,42 % |
| | | | | Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/keluraha Tingkat Kecamatan | Jumlah Desa yang dibina | 100% | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| | | | | Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kesadaran Kolektor Dalam Pengelolaan PBB | 100% | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| | | | | Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan | Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 100% | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | 82 | Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya | Lancarnya Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya | 100% | 93,11 % | 100 % | 93,11 % | 93,11 % | 100 % | 93,11 % | 93,11 % |
| 7 | 01 | 17 | 82 | Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Kegiatan TP. PKK Kecamatan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 17 | 82 | Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan | 100% | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 17 | | Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu (PATEN) | Meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 01 | 07 | 86 | Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) | Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Ciburupan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat | | | 82 | 82,5 | 82,5 | 823 | 83 | 82,75 | | 82 | |
| 2 | Prosentase Desa Berkinerja Baik | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | |
| 3 | Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | | | BB | BB | A- | A- | A | BB | | BB | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cisarupan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisarupan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cisarupan berdasarkan RKPD

Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Cisurupan.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Cisurupan sebesar **Rp. 5.416.777.060,-**.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cisurupan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Cisurupan mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 15 (Kegiatan) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Cisurupan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cisurupan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---------------------|---|----------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 4.839.072.110 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 5.870.434.097 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 100% | 19.940.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 100% | 21.934.000 | |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kecamatan | 1 dokumen | 19.940.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kecamatan | 1 dokumen | 21.934.000 | |
| 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 2.208.040.868 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 2.670.622.458 | |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Cisurupan | Jumlah pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Kecamatan | 12 Bulan | 2.197.977.298 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Cisurupan | Jumlah pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Kecamatan | 12 Bulan | 2.659.552.531 | |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Cisurupan | Jumlah Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Sesuai waktu | 25 Dokumen | 10.063.570 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Cisurupan | Jumlah Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Sesuai waktu | 25 Dokumen | 11.069.927 | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Administarsi Kepegawaian Perangkat daerah | 100 % | 22.184.650 | Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Administarsi Kepegawaian Perangkat daerah | 100 % | 9.019.450 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|---------------------|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--------------------|--|
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas sesuai Kebutuhan | 23 Orang | 22.184.650 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas sesuai Kebutuhan | 23 Orang | 9.019.450 | |
| 3.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pegawai yang dibina | 3 Orang | - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pegawai yang dibina | 3 Orang | - | |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Administarsi Umum Perangkat daerah | 100 % | 240.256.192 | Administrasi Umum Perangkat daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Administarsi Umum Perangkat daerah | 100 % | 209.520.544 | |
| 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai | - 5 Item | 6.447.600 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai | - 5 Item | 7.094.890 | |
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | - 47 Jenis | 86.716.900 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | - 47 Jenis | 95.393.265 | |
| 4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai | - 21 item | 19.702.092 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai | - 21 item | 8.692.301 | |
| 4.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan | - 2 Jenis | 18.951.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan | - 2 Jenis | 20.869.354 | |
| 4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan | 124 Koran / majalah | 9.798.600 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan | 124 Koran / majalah | 10.823.934 | |
| 4.6 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman harian, dan jamu tamu sesuai kebutuhan | 1632 Orang | 65.280.000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman harian, dan jamu tamu sesuai kebutuhan | 1632 Orang | 29.620.800 | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah | - 348 oh | 33.360.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah | - 348 oh | 37.026.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---|--------------|----------------------|---|----------------------------|---|--------------|----------------------|--|
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 2.289.683.600 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 2.885.168.033 | |
| 5.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas lapangan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Kendaraan dinas operasional Sesuai Kebutuhan | - 2 Unit | 72.178.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas lapangan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Kendaraan dinas operasional Sesuai Kebutuhan | - 2 Unit | 82.500.000 | |
| 5.2 | Pengadaan Maubeul | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Meubeul Sesuai Kebutuhan | - 4 Jenis | 113.954.100 | Pengadaan Maubeul | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Meubeul Sesuai Kebutuhan | - 4 Jenis | 52.668.033 | |
| 5.3 | Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Bangunan Gedung kantor Sesuai Kebutuhan | - 1 Lokasi | 2.103.551.500 | Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Bangunan Pagar kantor Sesuai Kebutuhan | - 1 Lokasi | 2.750.000.000 | |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 48.390.800 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 44.585.112 | |
| 6.1 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran Langganan telepon/ internet, Air dan Listrik | - 2 Jenis | 15.100.800 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran Langganan telepon/ internet, Air dan Listrik | - 2 Jenis | 12.495.912 | |
| 6.2 | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan | - 3 Jenis | 9.290.000 | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan | - 3 Jenis | 10.309.200 | |
| 6.3 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pelaksanaan out sourcing kebersihan | - 3 Orang | 24.000.000 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pelaksanaan out sourcing kebersihan | - 3 Orang | 21.780.000 | |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 10.576.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 29.584.500 | |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Kendaraan Dinas yang memadai dan jumlah pembayaran STNK kendaraan roda Dua dan Empat | - 7 Unit | 10.576.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Kendaraan Dinas yang memadai dan jumlah pembayaran STNK kendaraan roda Dua dan Empat | - 7 Unit | 11.071.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|--|--------------|--------------------|---|----------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| 7.2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan | - 1 Gedung | - | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan | - 1 Gedung | 18.513.000 | |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Cisarupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100 % | 162.726.300 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Cisarupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100 % | 108.678.570 | |
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | 100 % | 73.819.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | 100 % | 101.036.320 | |
| 1.1 | Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | - 6 Kegiatan | 73.819.000 | Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | - 6 Kegiatan | 101.036.320 | |
| 2. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | 100 % | 88.907.300 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | 100 % | 7.642.250 | |
| 2.1 | Perencanaan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Monitoring program Bansos (BPNT,PKH) Fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ), Fasilitasi Kegiatan Olahraga, Honor Covid | - 4 Laporan | 5.644.000 | Perencanaan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Monitoring program Bansos (BPNT,PKH) Fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ), Fasilitasi Kegiatan Olahraga, Honor Covid Prosedur | - 4 Laporan | 7.642.250 | |
| | Peningkatan Efektipitas pelaksanaan pelayanan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Penyediaan biaya pelaksanaan | - 2 Kegiatan | 83.263.300 | Perencanaan Kegiatan Pemerintah | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Penyediaan biaya pelaksanaan | - 0 Laporan | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|---|--------------|-------------------|---|----------------------------|---|--------------|--------------------|--|
| 2.2 | kepada masyarakat diwilayah kecamatan | | pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan | | | di tingkat Kecamatan | | pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan | | | |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN | Kecamatan Cisurupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN | 100 % | 3.240.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN | Kecamatan Cisurupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN | 100 % | 12.529.000 | |
| 1. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 3.240.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 12.529.000 | |
| 1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Cisurupan | Jumlah Dokumen RPTK | -1 Dokumen | 3.240.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Cisurupan | Jumlah Dokumen RPTK | -1 Dokumen | 12.529.000 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | - | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisurupan | Prosentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | - | |
| 2.1 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Cisurupan | Jumlah Kader PKK | - 43 Orang | - | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Cisurupan | Jumlah Kader PKK | - 43 Orang | - | |
| IV. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Cisurupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100 % | 31.720.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Cisurupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100 % | 105.991.050 | |
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Cisurupan | Prosentase Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 18.280.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Cisurupan | Prosentase Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 88.864.050 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|---|--------------|--------------------|--|----------------------------|---|--------------|--------------------|--|
| 1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran biaya konsultasi dengan kepolisian , TNI, dan intansi Vertikal di wilayah Kecamatan | 2 Kegiatan | 16.120.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran biaya konsultasi dengan kepolisian , TNI, dan intansi Vertikal di wilayah Kecamatan | 2 Kegiatan | 28.380.000 | |
| 1.2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran biaya rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat | 1 Kegiatan | 2.160.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan | 1 Kegiatan | 60.484.050 | |
| 2. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 13.440.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 17.127.000 | |
| 2.1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisian Republik Indonesia | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran Jumlah Pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan Perda/ Perkada | 1 Kegiatan | 13.440.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisian Republik Indonesia | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembayaran Jumlah Pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan Perda/ Perkada | 1 Kegiatan | 17.127.000 | |
| V. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Cisarupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100 % | 311.144.600 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Cisarupan | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100 % | 344.380.542 | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 331.144.600 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Cisarupan | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 344.380.542 | |
| 1.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan melalui pelaksanaan | 2 Kegiatan | 41.174.600 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan melalui | 2 Kegiatan | 47.380.300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---|--------------|-------------------|---|----------------------------|---|--------------|-------------------|--|
| | rangka memantapkan pengamalan Pasncasila, Pelaksanaa UUD tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | | upacara hari besar dan upacara/acara lainnya | | | dalam rangka memantapkan pengamalan Pasncasila, Pelaksanaa UUD tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | | pelaksanaan upacara hari besar dan upacara/acara lainnya | | | |
| 1.2 | Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembinaan wawasan Kebangsaan melalui pelaksanaan bimtek/sosialisasi | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Pembinaan wawasan Kebangsaan melalui pelaksanaan bimtek/sosialisasi | 1 Kegiatan | 55.000.000 | |
| 1.3 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Penyediaan Pembayaran biaya kegiatan Porkopincam sesuai Kebutuhan | 5 Kegiatan | 219.970.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Penyediaan Pembayaran biaya kegiatan Porkopincam sesuai Kebutuhan | 5 Kegiatan | 242.000.242 | |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kecamatan Cisarupan | FORSENTASE FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100 % | 68.874.050 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kecamatan Cisarupan | FORSENTASE FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100 % | 92.785.000 | |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarupan | Formentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 68.874.050 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarupan | Formentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 92.785.000 | |
| 1.1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarupan | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | 3 Kali | 13.983.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarupan | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | 3 Kali | 32.736.000 | |
| 1.2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 29.278.800 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga | Kecamatan Cisarupan | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 32.208.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | | Kemasyarakatan | | | | | |
| 1.3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Paembangunan Partisipatif | Kecamatan Cisurupan | Jumlah dokumen RPTK | 1 Dokumen | 25.612.250 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Paembangunan Partisipatif | Kecamatan Cisurupan | Jumlah dokumen RPTK | 1 Dokumen | 27.841.000 | |
| JUMLAH | | | | | 5.416.777.060 | | | | | | 6.534.798.259 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cisurupan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Cisurupan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Cisarupan
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cisarupan

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL : 09 Februari 2021

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Cisarupan
Tahun : 2022

a. Bidang Pemerintahan

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SKPD | LOKASI | VOLUME | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|----|--|-------------------------|------------|---------|------------|--------------------|
| 1 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Parsitipasi Masyarakat | Pembinaan RT/RW | DPMD | 17 Desa | 1 kegiatan | 500.000.000 |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Parsitipasi Masyarakat | Pembinaan LINMAS Desa | KESBANGPOL | 17 Desa | 1 kegiatan | 510.000.000 |
| 3 | Program peningkatan Perkembangan Desa | Pemutahiran profil Desa | DPMD | 17 Desa | 1 kegiatan | 170.000.000 |
| 4 | Program Peningkatan sarana dan prasarana Desa | Kearsipan Desa | BAPUSIPDA | 17 Desa | 17 Unit | 1.700.000.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|------|----------------|------------|----------------------|
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Parsitipasi Masyarakat | Pembinaan Kader Posyandu | DPMD | 17 Desa | 1 kegiatan | 170.000.000 |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Parsitipasi Masyarakat | Pembinaan dan pengadaan ATK BPD | DPMD | 17 Desa | 1 kegiatan | 340.000.000 |
| 7 | Program peningkatan pelayanan dasar Masyarakat | Pengadaan alat komunikasi RT | DPMD | 17 Desa | 754 unit | 754.000.000 |
| 8 | Program Pemekaran Desa | Pemekaran Desa | DPMD | Desa Sukawargi | 1 kegiatan | 500.000.000 |
| Jumlah | | | | | | 4.644.000.000 |

Cisurupan, 2021
CAMAT CISURUPAN,

ODIK SODIKIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b
NIP. 197409061999011001

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 09 Februari 2021

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Cisurupan

Tahun : 2022

b. Bidang Sosial Budaya

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SKPD | LOKASI | VOLUME | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|----|---|--|------------|----------------|------------|--------------------|
| 1 | Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum | Pembangunan Gedung Islamic Center | PUPR | Desa Cisurupan | | 5.000.000.000 |
| 2 | Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum | Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan | PUPR | Desa Balewangi | 600 M2 | 2.500.000.000 |
| 3 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan | Pembangunan Puskesmas dan Poned Pakuwon | Dinkes | Desa Pakuwon | 1 Paket | 1.200.000.000 |
| 4 | Pemberdayaan Pemuda Kreatif | Pemberdayaan Pemuda Kreatif KNPI | Kesbangpol | Desa Balewangi | 1 Kegiatan | 200.000.000 |
| 5 | Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Fasilitas keagamaan | Pembangunan Mesjid Besar Cisurupan | PUPR | Desa Cisurupan | 1 unit | 2.500.000.000 |
| 6 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan | Pembangunan/penggabungan rawat jalan ke rawat inaf puskesmas Cisurupan | Dinkes | Desa Balewangi | 1 Kegiatan | 1.000.000.000 |
| 7 | Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum | Pembangunan ruang kelas baru SDN | Disdik | 17 Desa | 51 ruang | 10.100.000.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|---------|---------|------------|-----------------------|
| 8 | Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan | Pembangunan gedung Posyandu | DPMD | 17 Desa | 106 Unit | 1.600.000.000 |
| 9 | Program Pemberdayaan Perempuan | Pembinaan Kader Dasa Wisma | DPMD | 17 Desa | 1 Kegiatan | 250.000.000 |
| 10 | Program Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan | Pengadaan sarana alat olahraga bola voli | DISPORA | 17 Desa | 17 Unit | 140.000.000 |
| 11 | Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Fasilitas keagamaan | Pembangunan mesjid | PUPR | 17 Desa | 17 Unit | 1.400.000.000 |
| Jumlah | | | | | | 25.890.000.000 |

Cisurupan, 09 Februari 2021
CAMAT CISURUPAN,

ODIK SODIKIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b
NIP. 197409061999011001

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 09 Februari 2021

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Ciburupan

Tahun : 2022

c. Bidang Ekonomi

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SKPD | LOKASI | VOLUME | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|----|--|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Pengembangan Desa wisata | Penataan kawasan agrowisata & agroporesty | Disparbud | Desa Karamatwangi | I paket | 50.000.000.000 |
| 2 | Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Tanaman Hortikultura Berkelanjutan | Pengadaan bibit jeruk lemon | Dinas peratnian | Desa Cintaasih | 12.000 pohon | 360.000.000 |
| 3 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Pengadaan bibit ternak domba garut | Diskannak | Desa Pangauban | 140 ekor | 250.000.000 |
| 4 | Program peningkatan modal, daya saing masyarakat | Pengadaan alat konveksi | Dinas UMKM | Desa Sukatani | 6 Unit | 500.000.000 |
| 5 | Program Pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian | Pengadaan alsintan | Dinas pertanian | Desa Ciburupan | 9 Unit | 1.800.000.000 |
| 6 | Program peningkatan hasil produksi | Pengadaan mesin untuk | Disperindag | Desa Balewangi | 5 paket | 100.000.000 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|------------------|-------------|---------------|
| | UMKM | UMKM keripik gebog (pelepah pisang) | | | | |
| 7 | Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pembukaan Jalan Usaha Tani | Dinas Pertanian | Desa Situsari | 3 KM | 1.000.000.000 |
| 8 | Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengembangan budi daya jamur | Dinas Pertanian | Desa Sirnagalih | 3 Kelompok | 100.000.000 |
| 9 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan bersih | Pengelolaan sampah terpadu | Dinas lingkungan hidup | Desa Tambakbaya | 6 Unit | 200.000.000 |
| 10 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Peternakan domba | Diskannak | Desa Cisero | 2 Kelompok | 300.000.000 |
| 11 | Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian | Peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani | Dinas Pertanian | Desa Pakuwon | 12 Kelompk | 100.000.000 |
| 12 | Program Pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian | Pengadaan alsintan/kultivator | Dinas Pertanian | Desa Simpangsari | 1 paket | 250.000.000 |
| 13 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Bantuan sarana peternakan Domba | Diskannak | Desa Pamulihan | 140 ekor | 250.000.000 |
| 14 | Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian | Peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani | Dinas pertanian | Desa Cipaganti | 8 Kelompok | 100.000.000 |
| 15 | Program pengembangan pelaku usaha UMKM | Bantuan modal kelompok usaha | Dinas UMKM dan koperasi | Desa Sirnajaya | 20 Kelompok | 100.000.000 |
| 16 | Program pengembangan sarana dan prasara pelaku ekonomi | Pengadaan pasar Desa | Disperindag | Desa Cidatar | 1 Paket | 1.000.000.000 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 17 | Program Pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian | Pengadaan alsintan/cultivator | Dinas Pertanian | Desa Sukawargi | 5 paket | 250.000.000 |
| Jumlah | | | | | | 56.660.000.000 |

Cisurupan, 09 Februari 2021
CAMAT CISURUPAN,

ODIK SODIKIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b
NIP. 197409061999011001

Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 09 Februari 2021

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Cisurupan

Tahun : 2022

d. Bidang Infrastruktur

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SKPD | LOKASI | VOLUME | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|----|---|--|------|---|---------|--------------------|
| 1 | Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten | Pembangunan Hot mix jalan Gudang | PUPR | Desa Balewangi | 1400 M | 1.200.000.000 |
| 2 | Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum | Pembangunan Kantor Kecamatan Cisurupan | PUPR | Desa Balewangi | 1 paket | 2.500.000.000 |
| 3 | Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten | Pembangunan Ready mix jalan kabupaten Simpangsari -Cisurupan | PUPR | Desa simpangsari s/d Desa Sirnajaya | 9 KM | 9.000.000.000 |
| 4 | Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten | Pembangunan drainase jalan provinsi | PUPR | Desa Cisero, Desa Cisarupan, Desa Sirnagalih dan Desa Pakuwon | 2000 M | 1.000.000.000 |
| 5 | Program peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa | Pembangunan hot mix jalan poros Desa | PUPR | Desa Sukatani, Desa Cintaasih | 3 KM | 2.500.000.000 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------------------------|----------|---------------|
| | | | | dan Desa Cidatar | | |
| 6 | Program peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa | Pembangunan rabat beton jalan Desa | PUPR | Desa Sukawargi | 1500 M | 800.000.000 |
| 7 | Program peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa | Pembangunan ready mix jalan Desa | PUPR | Desa Pamulihan | 2000 M | 500.000.000 |
| 8 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Perbaiki irigasi sampora | PUPR | Desa Situsari | 500 M | 200.000.000 |
| 9 | Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten | Pembangunan jembatan poros antar Kecamatan | PUPR | Desa Cidatar | 40 m | 800.000.000 |
| 10 | Program peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa | Pembangunan hot mix jalan Desa | PUPR | Desa Sirnagalih | 2000M | 1.000.000.000 |
| 11 | Program peningkatan dan mengurangi pencemaran lingkungan | Pembangunan MCK | Perkim | Desa Cisero | 5 Unit | 500.000.000 |
| 12 | Program Peningkatan dan Rehabiliasi kawasan kumuh | Pembangunan TPT | Perkim | Desa Karamatwangi | 300 M | 300.000.000 |
| 13 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pembangunan irigasi Ciharemas/curug jaya | PUPR | Desa Cisureupan | 1 paket | 800.000.000 |
| 14 | Program pembangunan Tanggul sungai sub DAS | Pembangunan TPT sub DAS Cirukem | PUPR | Desa Pangauban | 220 M | 250.000.000 |
| 15 | Program Peningkatan dan Rehabiliasi kawasan kumuh | Pembangunan TPT blok Cibeureum | Perkim | Desa Cipaganti | 290 M | 200.000.000 |
| 16 | Program peningkatan kualitas tempat tinggal rumah tidak layak huni | Pembangunan Rutilahu | Perkim | Desa Tambakbaya | 100 Unit | 1.750.000.000 |
| 17 | Program peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa | Pembangunan rabat beton jalan Desa | PUPR | Desa Sirnajaya Kp. Reuma | 7 KM | 750.000.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------|---|-------|-----------------------|
| 18 | Program Peningkatan dan Rehabilitasi kawasan kumuh | Pembangunan TPT | Perkim | Desa Sukatani | 250 M | 250.000.000 |
| 19 | Program peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa | Pembangunan jembatan penghubung antar desa | PUPR | Desa Pakuwon, Kp. Naringul RT.01 RW.06 | 15 M | 800.000.000 |
| 20 | Program Peningkatan dan Rehabilitasi kawasan kumuh | Pembangunan TPT | perkim | Desa Simpangsari kp Rancadadap RW.05 | 400 M | 200.000.000 |
| Jumlah | | | | | | 25.300.000.000 |

Cisurupan, 09 Februari 2021
CAMAT CISURUPAN,

ODIK SODIKIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I. IV/b
NIP. 197409061999011001

**Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun 2022
Kecamatan : Cisurupan**

Perangkat Daerah :Kecamatan Cisurupan

| NO | KEGIATAN | LOKASI/DESA | VOLUME | ALASAN |
|----|---|--|----------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sistem informasi desa (internet desa) | Desa Balewangi | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 2 | Pembangunan kantor kelembagaan desa | Desa Balewangi | 63 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 3 | Pembangunan Rutilahu | Dusun I, Dusun II ,dan Dusun III Desa Balewangi Kec. Cisurupan | 50 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 4 | Rehabilitasi Madrasah Al-Karomah | Kp. Pasar Kaler RT 01 RW 02 | 2 Kelas | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 5 | Pembangunan SPAL | Kp. Pasar Kaler RW 03 | | Usulan Tidak ada volume |
| 6 | Pembangunan Mesjid As-saleh | Kp. Pasir Pari RT. 03 RW. 03 Desa Balewangi Kec. Cisurupan | 1 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 7 | Pembangunan Jalan Pemukiman | Kp. Cibojong RW 04 | 500 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 8 | Bantuan Bibit Kopi | Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan | 1 Paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 9 | Permodalan Budi Daya Ikan Koi | Desa Balewangi Kec. Cisurupan | 500 ekor | Kalah dalam diskusi kelompok |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|------------------------------|
| 10 | Pengadaan Alat-alat Catering | Desa Balewangi Kec. Cisurupan | 5 Paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 11 | Pelatihan Tata Rias | Desa Balewangi Kec. Cisurupan | 1 Kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 12 | Pelatihan Pengelolaan Sampah | Kp. Gudang RT. 04 RW. 05 Desa Balewangi Kec. Cisurupan | 1 Kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 13 | Pembangunan TPT | Desa cidatar RW.02 | 200 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 14 | Pelatihan wirausaha untuk kelompok tani dan warga | Desa cidatar | 14 kelompok | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 15 | Pelatihan pengolahan daur ulang sampah | Desa cidatar | 1 kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 16 | penyediaan alat kesenian tradisional | Desa cidatar | 10 unit | |
| 17 | Pengadaan mobil sosial dasar desa | Desa Cintaasih | 1 unit | Usulan Tida bisa dilanjutkan |
| 18 | Pembuatan tugu batas desa | Desa Cintaasih Kp Sukasenang dan sindangasih | 2 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 19 | Pengadaan sarana informasi RW | Desa Cintaasih | 6 RW | Sudah ada program sapa warga |
| 20 | Pembangunan drainase | Desa Cintaasih RW.04 | 200 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 21 | Pembangunan TPT | Desa Cintaasih RW.04 | 200 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 22 | Pembangunan jalan lingkungan | Desa Cintaasih RW.04 | 200 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 23 | Desa wisata budidaya ternak domba | Desa Cintaasih | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 24 | Pengadaan mesin pengolahan kopi | Desa Cintaasih RW.01,03 | 2 paket | Kalah dalam |

| | | | | |
|----|--|----------------------|------------|---|
| | | | | diskusi kelompok |
| 25 | Pengadaan sarana pemandian dan keranda jenazah | Desa Cintaasih RW.04 | 1 paket | Tidak sesuai dengan ranwal RKPD kabupaten Garut |
| 26 | Pengadaan Sarana Perlengkapan Media Informasi | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 27 | Sertifikat Tanah | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 28 | Pembangunan Kantor RW | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 29 | Pengukuran Ulang Tanah | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 30 | Pembangunan TPS dan Daur Ulang Sampah | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 31 | Pembangunan Jalan Lingkungan | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 32 | Pembangunan TPT dan Drainase | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 33 | Penambahan Modal untuk Pengembangan BUMDES | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 34 | Mesin Daur Ulang Sampah | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 35 | Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah | Desa Cipaganti | | Usulan tidak ada volume |
| 36 | Pembangunan Sekretariat RW | Desa Cisero | 1 kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 37 | Pengadaan mobil ambulance desa | Desa Cisero | 1 unit | Kalah dalam |

| | | | | |
|----|---|----------------|------------|------------------------------|
| | | | | diskusi kelompok |
| 38 | Jaringan internet desa | Desa Cisero | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 39 | Pembangunan PJU RW 04, RW 06, RW 07 | Desa Cisero | 60 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 40 | Pembangunan Jalan lingkungan RW 02 | Desa Cisero | 110 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 41 | Koperasi | Desa Cisero | 1 kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 42 | Pelatihan keterampilan ekonomi | Desa Cisero | 1 kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 43 | Insentif Guru PAUD | Desa Cisero | | Usulan tidak ada volume |
| 44 | Insentif kader Posyandu | Desa Cisero | | Usulan tidak ada volume |
| 45 | Pengadaan mobil Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat | Desa Cisurupan | 1 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 46 | Pengadaan Plang BPD dan Lembaga Desa | Desa Cisurupan | 6 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 47 | Pembangunan Rumah Tidak layak huni(Rutilahu) | Desa Cisurupan | 130 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 48 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | Desa Cisurupan | 50 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 49 | Pengadaan Permodalan Kelompok Wanita Tani | Desa Cisurupan | 5 Klpk | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 50 | Pengadaan Sarana dan Prasarana BUMDES | Desa Cisurupan | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 51 | Insentif Guru Ngaji dan Madrasah | Desa | 150 orang | Kalah dalam diskusi kelompok |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|------------|------------------------------|
| 52 | Peningkatan operasional RT/RW | Desa karamatwangi | 51 orang | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 53 | Pembangunan skala RT/RW | Desa karamatwangi | 7 RW 44 RT | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 54 | Program lutilahu | Desa karamatwangi | 50 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 55 | Pembangunan TPT | Desa karamatwangi RW.02 | 300m | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 56 | Pengembangan UMKM pedagang kecil | Desa karamatwangi | 100UMKM | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 57 | Insentif guru ngaji | Desa karamatwangi | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 58 | Insentif guru paud | Desa karamatwangi | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 59 | Pengadaan mobil operasional | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 60 | Alat permainan luar paud | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 61 | Mebeler kantor desa | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 62 | Pembangunan drainase RW.05 | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 63 | Pembangunan TPT naringgul | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 64 | Program destinasi desa wisata | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 65 | Pembinaan kelompok wanita tani rapekan | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada volume |
| 66 | Insentif guru paud | Desa Pakuwon | | Usulan tidak ada |

| | | | | volume |
|----|---|---|-------------|------------------------------|
| 67 | Pembangunan Lapang Volly | Desa Pamulihan kp sindangsari rw 09 Dusun 2 | 25 M X 25 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 68 | Pembangunan Lapang Volly | Desa Pamulihan Kp Barukina rw 10 Dusun 2 | 25 M X 25 M | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 69 | Bantuan Alat Usaha Ekonomi Masyarakat | Desa Pamulihan Dusun 1-3 | 6 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 70 | Bantuan Modal Bumdes | Bumdes Desa Pamulihan | 1 Paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 71 | Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) | Desa Pamulihan | 57 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 72 | Tempat Pembuangan Sampah | Desa Pamulihan | 10 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 73 | Pembangunan Gazebo Desa Wisata | DesaPangauban | 20 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 74 | Pembangunan Tempat Lesehan Wisata Desa | Kp. Pamuruyan RT 006 RW 001, Kab. Garut, Cisarupan, Pangauban | 20 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 75 | Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Blok Ciraneg RW. 01, Kab. Garut, Cisarupan, Pangauban | 150 m | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 76 | Alat/Mesin Pengolahan Kopi Hulu | Desa Pangauban, Kab. Garut, Cisarupan, Pangauban | 1 Paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 77 | Pemberdayaan Guru Ngaji | Desa Pangauban, Kab. Garut, Cisarupan, Pangauban | 1 Ls | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 78 | Pengadaan APE Dalam PKBM TK PGRI dan PAUD KB Khoerul Bariyyah | Kp. Negla RT. 08 RW. 01, Kab. Garut, Cisarupan, Pangauban | 20 Paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 79 | Penegasan tapal batas desa | Desa simpangsari | 1kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 80 | Pembangunan jalan lingkungan | Desa Simpangsari | 1600m | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 81 | Pengadaan alat konpeksi | Desa Simpangsari | 1 paket | Kalah dalam |

| | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| | | | | diskusi kelompok |
| 82 | Mesin pembuat pupuk | Desa Simpangsari | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 83 | Rehabilitasi polindes | Desa Simpangsari | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 84 | Pembangunan tugu batas desa | Desa Sirnagalih | 1 kegiatan | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 85 | Pembangunan jalan lingkungan | Desa Sirnagalih rw.03 | 1 ls | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 86 | Perbaikan jalan lingkungan | Desa Sirnagalih rw.03 | 1 ls | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 87 | Bantuan usaha sarana peternakan | Desa Sirnagalih | | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 88 | Bantuan mesin konveksi IKM | Desa Sirnagalih | | Usulan tidak ada volume |
| 89 | Pembangunan RKB SMP | Desa Sirnagalih | | Usulan tidak ada volume |
| 90 | Penataan TPU | Desa Sirnagalih | | Usulan tidak ada volume |
| 91 | Pembangunan kantor sekretariat BPD | Desa Sirnajaya | 1 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 92 | Pembangunan desa wisata | Desa Sirnajaya | 1 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 93 | Pembangunan TPT jalan Desa | Desa Sirnajaya RW.04 | 75 m | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 94 | Pembangunan TPT jalan lingkungan | Desa Sirnajaya RW.04 | 200m | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 95 | Bantuan bibit teh | Desa Sirnajaya RW.05 | 5000 pohon | Kalah dalam |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------|------------------------------|
| | | | | diskusi kelompok |
| 96 | Bantuan modal persemaian | Desa Sirnajaya RW.05 | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 97 | Insentif guru RA dan kober | Desa Sirnajaya | 20 orang | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 98 | Pembangunan patok batas desa | Desa Situsari | | Usulan tidak ada volume |
| 99 | Pengerasan jalan lingkungan | Desa Situsari RW.03 | | Usulan tidak ada volume |
| 100 | Permodalan Usaha Ekonomi | Desa Situsari | | Usulan tidak ada volume |
| 101 | Pembibitan Ayam Petelur | Desa Situsari | | Usulan tidak ada volume |
| 102 | Bantuan pendidikan untuk masy. Bawah | Desa Situsari | | Usulan tidak ada volume |
| 103 | Pembangunan Gor Serbaguna Kp. Cidarengdeng | Desa Situsari RW 05 | | Usulan tidak ada volume |
| 104 | Pengadaan poskamling | Desa sukatani | | Usulan tidak ada volume |
| 105 | Pengadaan seragam kelembagaan | Desa sukatani | | Usulan tidak ada volume |
| 106 | Pembangunan jaling RW.10 | Desa sukatani | | Usulan tidak ada volume |
| 107 | Bimtek kelompok tani | Desa sukatani | 1 ls | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 108 | Bantuan peralatan mesin lumpia (UMKM) 6 kelompok | Desa sukatani | 1ls | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 109 | Penyediaan alat kesenian marawis 13 paket | Desa sukatani | 13 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|
| 110 | Pembangunan gedung posyandu | Desa Sukawargi di 10 RW | 10 Unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 111 | Modal usaha bagi kelompok tani | Desa Sukawargi | 3 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 112 | Pelatihan seni budaya | Desa Sukawargi | 1 paket | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 113 | Pembangunan tugu/gapura | Desa Tambakbaya | 3 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 114 | Pengembangan kampung KB | Desa Tambakbaya | 1 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |
| 115 | Pengembangan desa wisata | Desa Tambakbaya gunung jaya | 1 unit | Kalah dalam diskusi kelompok |

Cisurupan, 09 Februari 2021

CAMAT CISURUPAN,

ODIK SODIKIN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I. IV/b

NIP. 197409061999011001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Cisurupan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

- 1 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2 Pendidikan
- 3 Kesehatan
- 4 Penanggulangan Kemiskinan
- 5 Ketahanan Pangan
- 6 Infrastruktur
- 7 Iklim Investasi dan iklim usaha
- 8 Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
- 9 Kebudayaan
- 10 Kreativitas dan inovasi
- 11 Politik, hukum dan kemananan serta ketertiban
- 12 Perekonomian
- 13 Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Cisurupan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Cisurupan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisurupan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cisarupan mempunyai **tujuan : “Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik”**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cisarupan Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cisarupan Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cisarupan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cisarupan Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|-----|---|--|----------------------------|--------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik | Meningkatnya Pelayanan publik yang professional dan amanah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78 % |
| | | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | SAKIP | BB |

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Cisarupan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cisarupan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cisarupan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cisarupan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millenium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara

yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cisarupan diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Cisarupan Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cisurupan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Cisurupan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan Sulam Kerudung, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, sapi, serta obyek-obyek pariwisata seperti TWA Kawah papandayan, Nangklak dan *Buffalo Hill*.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cisurupan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1) **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan**

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cisurupan Tahun 2022 adalah 6 (Enam) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan.

2) **Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan**

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cisurupan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cisurupan dan mencakup semua Desa.

- 3) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 5.445.863.680,-

Adapun Program Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Cisurupan pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan kantor;
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- F) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan;
- b) Pengadaan Meubel;
- c) Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.

6) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- c) Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan;
- b) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pada Program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Perencanaan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pada Program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan:

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa.

2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan :

- a) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada Program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b) Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan yang dilaksanakan.

Pada Program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah.

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

- b) Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional);
- c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan:

- a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- b) Fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 G
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cisurupan

lembar 1 dari 5

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-------------------|---|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | KEWILAYAHAN | | | | 5.445.863.680,- | | | | 6.534.798.259 |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 5.445.863.680,- | | | | 6.534.798.259 |
| 7.01 | KECAMATAN CISURUPAN | | | | 5.445.863.680,- | | | | 6.534.798.259 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Prosentase fasilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Cisurupan | 100% | 4.876.098.780,- | DAU | | 100% | 5.870.434.097 |
| 7.01.01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Prosentase fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Kecamatan Cisurupan | 100% | 8.660.000,- | DAU | | 100% | 21.934.000 |
| 7.01.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Pembayaran Penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisurupan | 1 dokumen | 8.660.000,- | DAU | | 1 dokumen | 21.934.000 |
| 7.01.01.02 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Prosentase fasilitas Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Cisurupan | 100% | 2.202.531.298,- | DAU | | 100% | 2.670.622.458 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------|--------------------|
| 7.01.01.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 12 Bulan | 2.197.977.298,- | DAU | | 12 Bulan | 2.659.552.531 |
| 7.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Pembayaran biaya penyusunan dan laporan keuangan | Kecamatan Cisarupan | 25 Dokumen | 4.554.000,- | DAU | | 25 Dokumen | 11.069.927 |
| 7.01.01.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Prosentase fasilitas Administarsi Kepegawaian Perangkat daerah | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 22.184.650,- | DAU | | 100 % | 9.019.450 |
| 7.01.01.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Kecamatan Cisarupan | 23 Orang | 22.184.650,- | DAU | | 23 Orang | 9.019.450 |
| 7.01.01.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang dibina | Kecamatan Cisarupan | 3 Orang | - | DAU | | 3 Orang | - |
| 7.01.01.06 | Administrasi Umum Perangkat daerah | Prosentase fasilitas Administarsi Umum Perangkat daerah | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 244.530.532,- | DAU | | 100 % | 209.520.544 |
| 7.01.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Pembayaran Komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor | Kecamatan Cisarupan | 5 Item | 6.447.310,- | DAU | | 5 Item | 7.094.890 |
| 7.01.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan | Kecamatan Cisarupan | 47 Jenis | 112.884.745,- | DAU | | 47 Jenis | 95.393.265 |
| 7.01.01.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor sesuai Kebutuhan | Kecamatan Cisarupan | 21 item | 25.672.277,- | DAU | | 21 item | 8.692.301 |
| 7.01.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | Kecamatan Cisarupan | 2 Jenis | 18.951.000,- | DAU | | 2 Jenis | 20.869.354 |
| 7.01.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan | Kecamatan Cisarupan | 124 Koran /majalah | 9.895.200,- | DAU | | 124 Koran / majalah | 10.823.934 |
| 7.01.01.06.08 | | Jumlah Penyediaan makanan dan minuman | Kecamatan | 1632 Orang | 65.280.000,- | DAU | | 1632 Orang | 29.620.800 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--|--------------|----------------------|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | untuk memfasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan | Cisurupan | | | | | | |
| 7.01.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyediaan fasilitas perjalanan dinas dalam daerah | Kecamatan Cisurupan | 348 oh | 5.400.000,- | DAU | | 348 oh | 37.026.000 |
| 7.01.01.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase fasilitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisurupan | 100 % | 2.338.543.700,- | DAU | | 100 % | 2.885.168.033 |
| 7.01.01.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan | Kecamatan Cisurupan | 2 Unit | 72.178.000,- | DAU | | 2 Unit | 82.500.000 |
| 7.01.01.07.05 | Pengadaan Maubeul | Jumlah Penyediaan Meubeulair kantor Sesuai Kebutuhan | Kecamatan Cisurupan | 4 Jenis | 138.988.800,- | DAU | | 4 Jenis | 52.668.033 |
| 7.01.01.07.09 | Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Gedung kantor yang memadai | Kecamatan Cisurupan | 1 Lokasi | 2.127.376.900,- | DAU | | 1 Lokasi | 2.750.000.000 |
| 7.01.01.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisurupan | 100 % | 48.390.800,- | DAU | | 100 % | 44.585.112 |
| 7.01.01.08.02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Langganan telepon/ internet, Air dan Listrik | Kecamatan Cisurupan | 2 Jenis | 15.100.800,- | DAU | | 2 Jenis | 12.495.912 |
| 7.01.01.08.03 | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan | Kecamatan Cisurupan | 3 Jenis | 9.290.000,- | | | 3 Jenis | 10.309.200 |
| 7.01.01.08.04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pelaksanaan out sourcing kebersihan | Kecamatan Cisurupan | 3 Orang | 24.000.000,- | DAU | | 3 Orang | 21.780.000 |
| 7.01.01.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Cisurupan | 100 % | 11.257.800,- | DAU | | 100 % | 29.584.500 |
| 7.01.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pembayaran Service kendaraan dinas roda dua dan empat dan pajak tahunan | Kecamatan Cisurupan | 7 Unit | 11.257.800,- | DAU | | 7 Unit | 11.071.500 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------|--------------|----------------------|------------|--|--------------|--------------------|
| | | kendaraan dinas/operasional | | | | | | | |
| 7.01.01.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 1 Gedung | - | DAU | | 1 Gedung | 18.513.000 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 162.796.300,- | DAU | | 100 % | 108.678.570 |
| 7.01.02.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Prosentase fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 73.889.000,- | DAU | | 100 % | 101.036.320 |
| 7.01.02.01.02 | Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembayaran biaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 6 Kegiatan | 73.889.000,- | DAU | | 6 Kegiatan | 101.036.320 |
| 7.01.02.01.03 | Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Evaluasi Perkembangan desa/kelurahan tingkat Kecamatan | Jumlah desa yang di ikutsertakan dalam pelaksanaan perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa | Kecamatan Cisarupan | Desa | - | DAU | | 1 Kegiatan | 15.511.600 |
| 7.01.02.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 88.907.300,- | DAU | | 100 % | 7.642.250 |
| 7.01.02.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Monitoring Program bansos (BPNT, PKH,) fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ) Fasilitasi Kegiatan Olah Raga, Honor Covid | Kecamatan Cisarupan | 4 Kegiatan | 5.644.000,- | | | 4 Jenis | 7.642.250 |
| 7.01.02.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Penyediaan biaya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan | Kecamatan Cisarupan | 2 Kegiatan | 83.263.300,- | | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------------|--------------|---------------------|------------|--|--------------|---------------------|
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 3.240.000,- | DAU | | 100 % | 12.529.000 |
| 7.01.03.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 3.240.000,- | DAU | | 100 % | 12.529.000 |
| 7.01.03.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Pembayaran Biaya Penyusunan RPTK Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 1 Dokumen | 3.240.000,- | DAU | | 1 Dokumen | 12.529.000 |
| 7.01.03.02 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Prosentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 100 % | - | DAU | | 100 % | - |
| 7.01.03.02.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pembayaran Biaya Pelatihan Kader PKK tingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 43 Orang | - | DAU | | 43 Orang | - |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 35.770.000,- | DAU | | 100 % | 105.991.050 |
| 7.01.04.01 | Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 22.330.000,- | DAU | | 100 % | 88.864.050 |
| 7.01.04.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Jumlah Pembayaran biaya konsultasi dengan kepolisian, atni dan intansi vertikal di wilayah kecamatan | Kecamatan Cisarupan | 2 Kegiatan | 16.120.000,- | DAU | | 2 Kegiatan | 28.380.000 |
| 7.01.04.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Pembayaran Biaya rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Kecamatan Cisarupan | 1 Kegiatan | 6.210.000,- | DAU | | 1 Kegiatan | 60.484.050 |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 13.440.000,- | DAU | | 100 % | 17.127.000,- |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------|--|--------------|--------------------|
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pelaksanaan Patroli dalam rangka penegakan Perda/Perkada | Kecamatan Cisarupan | 12 Bulan | 13.440.000,- | DAU | | 12 Bulan | 17.127.000 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 299.084.600,- | DAU | | 100 % | 344.380.542 |
| 7.01.05.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 299.084.600,- | DAU | | 100 % | 344.380.542 |
| 7.01.05.01.01 | Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, undang undang dasar 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhana NKRI | Jumlah Pelaksanaan Upacara dan acara lainnya ditingkat Kecamatan | Kecamatan Cisarupan Tingkat Kecamatan | 2 Kegiatan | 41.174.600,- | DAU | | 2 Kegiatan | 47.380.300 |
| 7.01.05.01.02 | Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek wawasan Kebangsaan | Kecamatan Cisarupan Tingkat Kecamatan | 1 Kegiatan | 50.000.000,- | DAU | | 1 Kegiatan | 55.000.000 |
| 7.01.05.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan rapat Koordinasi Porkopincom, Koordinasi terkait Cocard | Kecamatan Cisarupan Tingkat Kecamatan | 5 Kegiatan | 207.910.000,- | DAU | | 5 Kegiatan | 242.000.242 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PORSENTASE FASILITASI PROGRAM PEMBINAAN DAN | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 68.874.000,- | DAU | | 100 % | 92.785.000 |

| | | PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--|--------------|----------------------|
| 7.01.06.01 | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase jumlah Laporan fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarupan | 100 % | 68.874.050,- | DAU | | 100 % | 92.785.000 |
| 7.01.06.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa | Kecamatan Cisarupan Tingkat Kecamatan | 3 Kali | 13.983.000,- | DAU | | 3 Kali | 32.736.000 |
| 7.01.06.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | Kecamatan Cisarupan Tingkat Kecamatan | 3 Kegiatan | 29.278.800,- | DAU | | 3 Kegiatan | 32.208.000 |
| 7.01.06.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen RPTK | Kecamatan Cisarupan Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 25.612.200,- | DAU | | 1 Dokumen | 27.841.000 |
| | | | | | 5.445.863.680,- | | | | 6.534.798.259 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Cisurupan Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja Tahun 2022 di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebesar Rp. 5.445.863.680 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.876.098.780,- |
| 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Rp. 8.660.000,- |
| a). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 8.660.000,- |
| Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % | |
| Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.660.000,- | |
| Keluaran : Pembayaran Biaya Dokumen Perencanaan Pada Tahun 2022. | |
| Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | |
| Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan | |
| 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Rp. 2.202.531.298,- |
| a). Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Rp. 2.197.977.298,- |
| Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % | |
| Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.197.977.298,- | |
| Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pada Tahun 2022. | |
| Hasil : Persentase ASN yang memiliki | |

Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Ciburupan

b). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 4.554.000,-

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.554.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Ciburupan

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Rp. **22.184.650**

1). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Rp. 22.184.650

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 22.184.650,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Ciburupan

| | | |
|--|-----|---|
| 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah | Rp. | 244.530.532,- |
| 1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Rp. | 6.447.310,- |
| Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % |
| Masukan | : | Jumlah Dana Rp 6.447.310,- |
| Keluaran | : | Pembayaran Biaya Alat-alat Listrik Pada Tahun 2022. |
| Hasil | : | Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% |
| Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Ciburupan |
| 2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. | 112.884.745,- |
| Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % |
| Masukan | : | Jumlah Dana Rp. 112.884.745,- |
| Keluaran | : | Pembayaran Biaya Perlengkapan Alat-alat Kantor Pada Tahun 2022. |
| Hasil | : | Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% |
| Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Ciburupan |
| 3). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. | 25.672.277,- |
| Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % |
| Masukan | : | Jumlah Dana Rp. 25.672.277,- |

- Keluaran : Pembayaran Biaya Alat-alat Rumah Tangga Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 4). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan Rp. 18.951.000,-
- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.951.000,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Cetak dan Peggandaan Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 9.895.200,-
- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.895.200,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Majalah/ Surat Kabar Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 6). Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 65.280.000,-

- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 65.280.000,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Jamuan Tamu Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 7). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP Rp. 5.400.000,-
- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.400.000,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** Rp. **2.338.543.700,-**
- 1). Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Rp. 72.178.000,-
- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp.113.954.100,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Pengadaan

- Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 2). Sub Kegiatan Pengadaan meubeul Rp. 138.988.800,-
- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp.113.954.100,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Meubeulair Kantor Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 3). Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 2.127.376.900,-
- Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %
- Masukan : Jumlah Dana Rp. .127.376.900,-
- Keluaran : Pembayaran Biaya Pemagaran Halaman Kantor Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan
- 1.6 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 48.390.800,-**

Masukan : Jumlah Dana Rp.
24.000.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Jasa
Kebersihan Kantor Pada
Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan
target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp. **11.257.800,-**
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 11.257.800,-

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan
Pemerintah daerah
Kabupaten/ kota dalam
kondisi baik Dengan Target
Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.257.800,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Pajak
Kendaraan Dinas Operasional
(STNK) Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan
target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

2). Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya Rp. 0,-

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan
Pemerintah daerah
Kabupaten/ kota dalam
kondisi baik Dengan Target
Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 0,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Perawatan
Gedung Kantor Dinas

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|-------|-----|----------------------|
| | Operasi | lala | Pada | Tahun | | |
| | | | | | | 2022. |
| Hasil | : | Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | | | | |
| Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Cisurupan | | | | |
| 2. | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | Rp. | 162.769.300,- |
| 2.1 | | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Rp. | 73.889.000,- |
| 1). | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Rp. | 73.889.000,- |
| | Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % | | | |
| Masukan | : | Jumlah Dana | | Rp. | | 73.819.000,- |
| Keluaran | : | Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022. | | | | |
| Hasil | : | Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | | | | |
| Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Cisurupan | | | | |
| 2.2 | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | Rp. | 88.907.300,- |
| 1). | | Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan | | | Rp. | 5.644.000,- |
| | Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % | | | |
| Masukan | : | Jumlah Dana | | Rp. | | 5.644.000,- |

| | | | | |
|------------------|---|---|-----|--------------------|
| Keluaran | : | Pembayaran Biaya Pelaksanaan Monitoring Program bansos, Fasilitas kegiatan keagamaan dan Olahraga di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022. | | |
| Hasil | : | Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | | |
| Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Cisurupan | | |
| 2). | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp. | 83.263.300,- |
| Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % | | |
| Masukan | : | Jumlah Dana Rp. 83.263.300,- | | |
| Keluaran | : | Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pelayanan masyarakat di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022. | | |
| Hasil | : | Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | | |
| Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Cisurupan | | |
| 3. | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 3.240.000,- |
| 3.1 | | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp. | 3.240.000,- |
| 1). | | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Rp. | 3.240.000,- |
| Capaian Program | : | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja % | | |

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.240.000,-
 Keluaran : Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penysunan RPTK di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022.
 Hasil : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

3.2 Kegiatan Peberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Rp. **0,-**

1). Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Rp. 0,-

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 0,-
 Keluaran : Pembayaran Biaya Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022.
 Hasil : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. **35.770.000,-**

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. **22.330.000,-**

1). Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp. 16.120.000,-
 Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.120.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Ciburupan

2). Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp. 6.210.000,-

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.210.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Ciburupan

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Rp. 13.440.000,-

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan
Pemerintah daerah
Kabupaten/ kota dalam
kondisi baik Dengan Target
Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.440.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya
Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi di Tingkat
Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Pemerintah Desa
yang memiliki Prestasi kerja
baik dengan target kinerja
100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. **299.084.600,-**

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. **299.084.600,-**

1). Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka memanfaatkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
pelestarian Bineka Tunggal Ika serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan
Pemerintah daerah
Kabupaten/ kota dalam
kondisi baik Dengan Target
Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 41.174.600,-

Keluaran : Pembayaran Biaya
Pelaksanaan Kegiatan
Peringatan Upacara hari besar
dan upacara acara lainnya di
Tingkat Kecamatan Pada
Tahun 2022.

Hasil : Persentase Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rp. 207.910.000

Capaian Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 207.910.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisurupan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Rp. 68.874.050,-

6.1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 68.874.050,-

1). Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 13.983.000,-

Capaian Program : Persentase Pemerintah Desa yang berkinerja baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.983.000,-

Keluaran : Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Upacara hari besar

dan upacara acara lainnya di Tingkat Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cisarupan

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 5.445.863.680,-

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Cisarupan Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cisarupan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Cisarupan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Cisarupan Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Cisarupan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN